



#### DPMPTP PADANG PARIAMAN

**d. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri,**

dengan:

- a) Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;
- b) Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa;
- c) Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan
- d) Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.

Penyusunan rencana strategis BKPM&PPTP Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Dokumen rencana strategis BKPM RI yang disusun untuk periode 2020- 2024 menjelaskan bahwa arah utama kebijakan BKPM adalah upaya untuk meningkatkan investasi daerah yang memberikan nilai guna dan nilai manfaat yang besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat daerah. Tujuan BKPM RI yang tertuang di dalam dokumen rencana strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah;  
Tujuan ini disusun agar terjadi kesinambungan rencana penanaman modal baik domestik dan asing antar lembaga dan antar daerah. Kesinambungan rencana yang disusun akan memberikan keuntungan sinergitas dan keuntungan aksi strategis dalam penyusunan program investasi. Selain itu, koordinasi perencanaan juga menjegah munculnya kebijakan dan program yang kontra- produktif antar sektor dan lembaga dalam proses penanaman modal dan investasi di Indonesia.
2. Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif; Indonesia perlu mencitrakan diri sebagai negara yang kondusif sebagai tujuan investasi baik untuk investor dalam negeri maupun luar negeri.
3. Citra sebagai negara kondusif memberikan jaminan kepada calon investor berkaitan dengan keamanan investasi yang ditanamkan. Negara kondusif yang dicitrakan bukan hanya berkaitan dengan keamanan nasional tapi juga



#### DPMPTP PADANG PARIAMAN

kepastian hukum dan penerimaan masyarakat terhadap penanaman modal.

4. Meningkatnya posisi tawar, kerjasama, dan implementasi hasil-hasil kesepakatan di bidang pelayanan penanaman modal; Posisi tawar negara relatif terhadap negara lain menjadi faktor penting dalam menarik investor serta memastikan penanaman modal dengan prinsip berkeadilan antarinvestor, negara, dan masyarakat.
5. Kekuatan dan daya saing pemerintah beserta tawaran kebijakan menjadi insentif penting bagi penanam modal dalam mengambil keputusan investasi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga perlu mengimplementasikan hasil berbagai kesepakatan penanaman modal dengan cepat dan efektif untuk mempercepat pertumbuhan investasi dan mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional
6. Meningkatnya daya saing dibidang pelayanan penanaman modal; Sebagai lembaga pelayanan publik dan perumus kebijakan penanaman modal nasional, BKPM perlu menempatkan diri sebagai lembaga yang berdaya saing dari sisi pelayanan kepada pengguna jasa. Beberapa aspek perlu diperhatikan pada konteks ini seperti kepastian layanan, kehandalan layanan, serta ketepatan pelayanan terhadap administrasi, birokrasi, dan kebijakan penanaman modal. Regulasi yang tegas dan berkeadilan menjadi salah satu pilar yang bisa dijadikan untuk meningkatkan daya saing lembagadalam melaksanakan fungsi pelayanan penanaman modal.
7. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha nasional; Indonesia perlu menempatkan diri sebagai negara yang mampu menjadi pusat kegiatan bisnis dan menarik bagi investor untuk menanamkan modal. Untuk itu, pemerintah harus menciptakan atmosfir yang kondusif dan cocok untuk penanaman modal terutama dari sudut pandang kepastian hukum dan pelayanan. Selain itu, usaha ini juga harus sejalan dengan upaya pengembangan potensi daerah sebagai daya tarik tujuan investasi agar program penanaman modal nasional bersifat merata antar daerah.
8. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional; BKPM RI perlu berupaya keras untuk merealisasikan rencana investasi terutama memastikan investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, baik lokal maupun manca negara, menanamkan modal mereka di Indonesia.
9. Selain meningkatkan jumlah calon investor yang tertarik untuk berinvestasi dan jumlah modal yang ditanamkan, BKPM RI juga harus berupaya untuk mewujudkan rasio yang optimal diantara kedua indikator tersebut.
10. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal.

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam



#### DPMPTP PADANG PARIAMAN

penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan di atas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama BPKM daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai tujuan di atas dioperasionalkan ke dalam bentuk sasaran kinerja yang berfungsi sebagai indikator kinerja BPKM RI. Berbagai indikator tersebut adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
2. Semakin efektifnya kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal;
3. Meningkatnya koordinasi dan partisipasi aktif dalam forum perundingan kerjasama internasional dan kerjasama dengan dunia usaha asing didalam dan luar negeri di bidang penanaman modal;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di atas, BKPM RI menyusun beberapa strategi sebagai pendekatan pencapaian kinerja dan pelaksanaan aktivitas yang lebih operasional. Berbagai strategi yang ditetapkan mencakup setiap fungsi kerja BKPM dan diselaraskan dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pendekatan strategi yang digunakan oleh BKPM pusat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal;
2. Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor;
3. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional;
5. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional;
6. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP dibidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi;
7. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing;
8. Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar instansi sektoral dibidang penanaman modal;
9. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
10. Meningkatkan realisasi penanaman modal.



#### DPMPTP PADANG PARIAMAN

Berdasarkan tujuan sasaran yang disusun oleh BKPM RI, serangkaian program kerja dan rencana aksi juga dirumuskan. Program kerja yang disusun diarahkan kepada upaya pencapaian tujuan strategis nasional yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai bagian dari upaya penyusunan rencana program, BKPM RI menetapkan beberapa arahan kebijakan yang dijadikan sebagai panduan. Arahan Kebijakan BKPM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional;
2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;
3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM.

#### **Telaah Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020-2024**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, serta mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Perindustrian RI merumuskan visi pembangunan industri tahun 2020-2024 yaitu adalah Indonesia menjadi negara industri yang berdayasaing dengan struktur industri yang kuat berbasis sumber daya alam dan berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi yaitu :

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional.

Mengacu kepada arah kebijakan RPJMN 2020-2024 maka arah kebijakan umum dan strategi pembangunan industri nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Perwilayahan Industri diluar Pulau Jawa, dengan strategi meliputi :
  - a. Fasilitasi pembangunan 14 kawasan industri (KI);
  - b. Membangun 22 sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM);
2. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah dan



#### DPMPTP PADANG PARIAMAN

logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja. Penumbuhan populasi industri, dengan menambah 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 % tumbuh diluar Jawa, serta tumbuhnya industri kecil 20 ribu unit usaha, dengan strategi meliputi :

- a. Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi);
  - b. Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi kebutuhandalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja;
  - c. Mendorong investasi untuk industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur);
  - d. Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global;
  - e. Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (Original Equipment Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.
3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah PerTenaga Kerja) dengan strategi meliputi :
- a. Peningkatan efisiensi teknis, melalui :
    - Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri.
    - Peningkatan dan pembaharuan ketrampilan tenaga kerja.  
Optimalisasi ekonomi lingkup industri
  - b. Peningkatan penguasaan IPTEK / inovasi
  - c. Peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru (new product development) oleh industri domestik, Pembangunan faktor input (peningkatan kualitas SDM industri dan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau).
  - d. Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas.
- Sementara itu, sasaran pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dijabarkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019, meliputi :
1. Penguatan Kelembagaan, melalui :
    - a. Penguatan sentra IKM
    - b. Revitalisasi dan pembangunan unit pelayanan teknis
    - c. Penyediaan tenaga penyuluh lapangan
    - d. Penyediaan konsultan industri kecil dan menengah



## DPMPTP PADANG PARIAMAN

2. Pemberian Fasilitas, melalui :
  - a. Peningkatan kompetensi SDM
  - b. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis
  - c. Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong
  - d. Pemberian bantuan mesin atau peralatan
  - e. Pengembangan produk
  - f. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
  - g. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran
  - h. Fasilitasi akses pembiayaan
  - i. Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan
  - j. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar
  - k. Fasilitasi HKI terhadap IKM
  - l. Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM

Program Kementerian Perindustrian 2020 – 2024 adalah :

1. Program Penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro
2. Program penumbuhan dan pengembangan industri kimia, tekstil dan aneka
3. Program penumbuhan dan pengembangan industri alat transportasi, mesin, elektronik, dan alat pertahanan
4. Program penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah
5. Program percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri
6. Program peningkatan ketahanan dan kerjasama internasional dibidang industri
7. Program pengembangan teknologi dan kebijakan industri
8. Program pengembangan SDM industri dan dukungan manajemen Kementerian Perindustrian

### 3.3.3 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip dari pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi

kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran



### DPMPTP PADANG PARIAMAN

hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livehood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengantisipasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan. KLHS juga merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Adapun Integrasi antara renstra Bapeitbangda dengan KLHS RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.2 .

**Tabel 3.2**  
**Target dan indikator Usulan Program dan kegiatan yang terintegrasi pada KLHS RPJMD Tahun 2021-2026**

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR/TFE	ARAH EBSEDIKAN	INDIKASI PROGRAM	PROGRAM	JENIS URUSAN/OPD
1	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Meningkatkan informasi tentang industri pengolahan hasil pertanian	1. Peningkatan promosi produk IKM dan hilirisasi 2. Peningkatan produksi hasil produk IKM dan hilirisasinya pertanian 3. Peningkatan penumbuhan wirausaha dan kemampuan SDM	Pengembangan Usaha kecil dan menengah UMKM	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Meningkatkan pemantauan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi	1. Peningkatan produktivitas ekonomi lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan inovasi, teknologi 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja 3. Peningkatan kualitas, validitas data pertumbuhan per orang bekerja per tahun	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
3	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian,	Menggalakkan pembangunan dan mendukung	1. Pengembangan Usaha kecil untuk menciptakan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman	Dinas Penanaman Modal Pelayanan



DPMPTP PADANG PARIAMAN

berdasarkan jenis kelamin

kegiatan produktif

2. Peningkatan kualitas pengerajin dan bahan baku Modal

Terpadu dan Perindustrian

Target dan indikator Usulan Program dan kegiatan yang terintegrasi pada KLHS RPJMD

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	PROGRAM	JENIS URUSAN/OP
1	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Meningkatkan informasi tentang industri pengolahan hasil pertanian	1. Peningkatan promosi produk IKM dan hilirisasi 2. Peningkatan produksi hasil produk IKM dan hilirisasinya pertanian 3. Peningkatan penumbuhan wirausaha dan kemampuan SDM	Pengembangan Usaha kecil dan menengah UMKM	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja pertahun	Meningkatkan pemantauan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi	1. Peningkatan produktivitas ekonomi lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan inovasi, teknologi 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja 3. Peningkatan kualitas, validitas data pertumbuhan per orang bekerja per tahun	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
3	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Mengalakkan pembangunan dan mendukung kegiatan produktif	1. Pengembangan Usaha kecil untuk menciptakan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi 2. Peningkatan kualitas pengerajin dan bahan baku	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
4	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Meningkatkan pencapaian pekerjaan tetap dan produktif dari kalangan perempuan muda dan disabilitas untuk pekerjaan yang sama nilainya	1. Peningkatan standar indikator kinerja 2. Peningkatan SDM tenaga kerja (Jasa) 3. Peningkatan pelayanan Indeks kepuasan Masyarakat	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
5	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000	Meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan	Pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan	2.18.02 Program pengembangan Iklim	Dinas Penanaman Modal





DPMPTP PADANG PARIAMAN

		penduduk dewasa	masyarakat	keuangan	Penanaman Modal	Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
6	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Mengembangkan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata layak promosi	Pengembangan ragam promosi untuk Peningkatan promosi parawisata lokal	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
7	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Meningkatkan akses permodalan usaha untuk masyarakat	1. Peningkatan kerjasama dengan pihak bank 2. Peningkatan Penatausahaan keuangan masyarakat	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian

**Penentuan Isu-isu Strategis**

Seluruh Isu di atas erat kaitannya dengan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan roh dan tuntutan otonomi daerah. Pimpinan eksekutif dan legislatif memiliki peran dan kewenangan yang semakin strategik. Oleh karena itu kolaborasi efektif antara pimpinan eksekutif dan legislatif merupakan kondisi awal yang harus diciptakan dan diupayakan secara maksimal. Secara normatif, pencapaian keinerja

pembangunan daerah terletak dipundak kedua institusi tersebut. Namun tantangan utama yang dihadapi adalah harmonisasi dan sinergitas antara kedua insitusi ini masih jauh dari kondisi yang diinginkan. Belum terwujudnya *good governance* secara maksimal merupakan hambatan utama dalam proses perwujudan kinerja pemerintah kabupaten. Pada sisi lain pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu secara berkualitas menata urusan pemerintah secara otonom sesuai dengan kaedah dan nilai- nilai otonomi daerah yang dilandasi oleh perinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Namun eksisnya permasalahan yang berkaitan dengan kualitas birokrasi pemerintah daerah masih merupakan isu strategik yang eksis dalam impelemntasi hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

**4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTP**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin



## DPMPTP PADANG PARIAMAN

diraih dari masing-masing misi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mampu mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan yang ditetapkan dalam renstra disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan disesuaikan dan konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman menetapkan tujuan sebagai berikut



DPMPTP PADANG PARIAMAN  
**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Visi dan Misi DPMPTP**

Pernyataan visi dimulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yang mencakup proses penyusunan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, dan penyusunan alokasi pembiayaan program. Pedoman utama penyusunan visi adalah bagaimana menyesuaikan dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Mengacu pada konsep penetapan Visi tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian menetapkan Visi sebagai berikut: **"MEWUJUDKAN PENINGKATAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BERKUALITAS SERTA PERINDUSTRIAN YANG BERDAYA SAING"**



**DPMPTP PADANG PARIAMAN**  
**VISI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

VISI	POKOK POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Mewujudkan Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan Satu Pintu Yang Berkualitas serta Perindustrian Yang Berdaya Saing	Pelayanan terpadu satu pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu	Peningkatan Investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu maksudnya: Menjadi penyelenggara dalam satu tempat yang telah terintegrasi dalam satu proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Kab. Padang Pariaman.
	Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu;	Perindustrian yang Berdaya Saing maksudnya : PTSP yang berkualitas, maksudnya : Pelayanan Terpadu Satu yang mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang transparan, tepat waktu sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dan investor
	Berdaya saing adalah tingkat produktivitas guna mengembangkan kemampuan	Industri yang berkualitas: industri yang mandiri, menganut nilai-nilai kewirausahaan, produktif, berorientasi kepada proses dan hasil yang meningkat daya saing baik dipasar local maupun nasional  Industri yang berdaya saing maksudnya: perindustrian yang memiliki daya saing untuk bisa mempertahankan diri terhadap gejolak perekonomian

Sedangkan misi yang diemban Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan Iklim Penanaman Modal Yang Lebih Kondusif
- b. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas
- c. Meningkatkan kualitas dan daya saing industri
  1. Meningkatnya Jumlah Investor
  2. Meningkatnya pelayanan perizinan yang prima, aspiratif dan partisipatif
  3. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian. Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pada kurun waktu 2021–2026, sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya



**DPMPTP PADANG PARIAMAN**

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance, serta didukung oleh kinerja aparatur pelayanan yang kompeten.

Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dengan membandingkan antara target dengan realiasi indikator sasaran berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2021-2026. Implementasi Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) pada tahun 2020 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) pada tahun 2021, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) menyusun perencanaan Kinerja Tahun 2021 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) tahun 2021. Target-target kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) tahun 2020 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP).

**Tabel 4.1 T.C-25**

**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Serta Target Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

Tujuan	Tujuan Indikator	Target Kinerja akhir RPJRD	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Tujuan 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nilai PORB Sektor Industri	12,04	Meningkatnya Perekonomian masyarakat melalui Sektor Perindustrian	IK 1 : Pertumbuhan PORB sektor Perindustrian IK 2 : Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PORB	11,19	11,8	12,6	13,3	14,2	15,0	16,0
5	TUJUAN 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien Indeks reformasi birokrasi	A	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi	IK : Indeks RB Rumus : Hasil Evaluasi RB	A	A	A	A	A	A	A
7	Tujuan 2: Meningkatkan nilai investasi /penanaman modal Jumlah Investor	60%	Meningkatnya nilai investasi	IK : Persentase peningkatan nilai investasi	330.59 0.007 (Ribu)	365.1 00.00 (Ribu)	403.3 00.00 (Ribu)	445.4 00.00 (Ribu)	491.9 00.00 (Ribu)	543.7 00.00 (Ribu)	606.8 00.00 (Ribu)



DPMPTP PADANG PARIAMAN  
**BAB V**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

**5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bapelitbangda adalah strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel 5.1. T.C-26.

dan



**DPMPTP PADANG PARIAMAN**  
**Tabel 5.1. T.C-26**

**Strategi, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Urutan	Peningkat Daerah
5. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pembedayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Perencanaan Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Mengembangkan potensi wilayah dengan Masterplan Industri	Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing	Pengembangan Sentra Industri Potensial	perindustrian	DPMPTP
5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kinerja RS	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT	Program Reformasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Non Urutan	Sekolah OFD
7 Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui pencapaian iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan pencapaian lapangan kerja.	Meningkatnya nilai investasi / penanaman modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Peningkatan nilai investasi Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkatkan promosi dan kampanye investasi	Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	penanaman modal	DPMPTP
					Meningkatkan pelayanan investasi	Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperkuat an-kooperasian rencana tahunan dan kearifan lokal	Deregulasi Pelayanan dan Pengendalian Perijinan	penanaman modal	DPMPTP

REVISI BERJERANG					
Ketua Tim		Dairis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
20/7/23	[Signature]	24/7-23	[Signature]	27/7-23	[Signature]



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berkonsentrasi pada pencapaian Misi ke 3,5 dan 7 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu

- ❖ 3 "Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat"
- ❖ 5 "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan"

Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelaksanaan Kebijakan pada urusan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Program-program pembangunan pada urusan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan menggunakan Kodifikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut

;





## DPMPTP PADANG PARIAMAN

---

### Misi 3 Urusan Perindustrian

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

### Misi 5 Sekretariat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

### Misi 7 Urusan Penanaman Modal

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten (DPMPTP) Padang Pariaman yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman .

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel 6.1.T.C 27 dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

REVISI BERJENJANG					
Ratus Tim		Detail		Wajib	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
08/03/20	[Signature]	04/03/20	[Signature]	20/03/20	[Signature]

Tabel 6.1 TC. 27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

Tipe	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pengembangan Daerah	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Kualitas Kinerja Awal (P.30)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peringkat Daerah Penanggung Jawab					
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
MISI 6 : Menwujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkualitas, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, transparan, partisipatif dan tanggap																								
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman	SAGARA N17	Meningkatkan Indeks Daya Saing Masyarakat Berkeadilan	01.01.01.001	PROGRAM Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Daerah Kabupaten/NKota	Persentase Terealisasi Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp16.018.107.473	100%	Rp17.757.484.304	100%	Rp18.764.988.208	100%	Rp20.992.733.288	100%	Rp21.961.833.630	100%	Rp21.999.933.989	DPPMPTP					
							100%	Rp3.806.416.380	100%	Rp4.170.002.142	100%	Rp4.175.097.734	100%	Rp4.926.268.848	100%	Rp4.348.381.018	100%	Rp4.386.986.822						
							A	A	A	A	A	A	A											
							100%		100%		100%		100%		100%		100%							
							2	1	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0		1	2	0	1	2
							2	1	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0		1	2	0	1	2
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		N/A	90%	24.934.150	92%	25.000.000	94%	40.137.010	96%	52.103.000	98%	58.710.000	100%	69.500.000	Sektor					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	5 Dokumen	12.250.000	5 Dokumen	12.300.000	5 Dokumen	11.780.000	5 Dokumen	13.923.000	5 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	18.000.000						
				Koordinasi dan penyusunan DP4-SKPD		N/A	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	5.746.000	2 dokumen	6.750.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.200.000						
				Koordinasi dan penyusunan Perubahan DP4-SKPD		N/A	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	7.260.000	2 dokumen	8.540.000	2 dokumen	9.000.000	2 dokumen	10.000.000						

2	1	0	2	0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Kunci SKPD	Jumlah Dokumen Laporan LKPP, LKPP, Lap Capkin	3 dokumen	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	8.829.810	3 dokumen	8.950.000	3 dokumen	9.230.000	3 dokumen	11.360.000
2	1	0	2	0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPMPTP 0,400, Laku)	3 dokumen	3 dokumen	12.684.150	3 dokumen	12.700.000	3 dokumen	13.680.000	3 dokumen	14.000.000	3 dokumen	15.480.000	3 dokumen	20.000.000
2	1	0	2	0		Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.247.135,738	100%	3.257.303,738	100%	3.268.186,713	100%	3.562.363,999	100%	3.472.213,918	100%	4.988.732,139
2	1	0	2	0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Karyawan ASN	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah	3.200.400,738	1 Perangkat daerah	3.203.022,738	1 Perangkat daerah	3.225.126,173	1 Perangkat daerah	3.534.607,249	1 Perangkat daerah	3.503.248,643	1 Perangkat daerah	4.809.495,702
2	1	0	2	0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	40.980.000	12 Bulan	40.780.000	12 Bulan	40.960.000	12 Bulan	42.714.700	12 Bulan	51.864.815	12 Bulan	60.294.487
2	1	0	2	0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan akhir tahun	Nilai	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	5.600.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	8.900.000	1 dokumen	9.900.000
2	1	0	2	0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, LRU Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.200.000	1 Laporan	6.300.000	1 Laporan	6.800.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	9.500.000
2	1	0	2	0		Administrasi Pengembangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	90%	90%	18.963.000	92%	34.947,24	94%	36.990,88	96%	40.670,47	98%	65.930,04	100%	55.593,04
2	1	0	2	0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beresita Akibat Kelangkaannya	Jumlah Pakaian Dinas Beresita Akibat Kelangkaannya	Nilai	42 orang	-	42 orang	-	42 orang	7.500.000	42 orang	8.300.000	42 orang	9.430.000	42 orang	15.000.000
2	1	0	2	0	08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berhubungan Tugas dan Fungsinya	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berhubungan Tugas dan Fungsinya	12 Orang	12 orang	-	12 orang	5.917.216	12 orang	6.750.000	12 orang	8.070.473	12 orang	10.500.000	12 orang	11.000.000
2	1	0	2	0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	Nilai	42 orang	-	42 orang	-	42 orang	5.840.000	42 orang	8.400.000	42 orang	9.800.000	42 orang	9.500.000
2	1	0	2	0	11	Strategi Pelaksanaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Pencana) yang mengikuti Bimbel Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang pemerintahan pemerintahan Daerah	Nilai	6 orang	29.963.000	6 orang	3.000.000	6 orang	14.500.000	6 orang	15.200.000	6 orang	17.000.000	6 orang	20.000.000

2	1	0	2	0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlengkapannya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	117.786.700	12 bulan	119.843.858	12 bulan	134.886.800	11 bulan	146.923.800	12 bulan	163.988.800	12 bulan	163.548.800	Sekali
2	1	0	2	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Standard	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Standard	N/A	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	6.200.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	10.500.000	
2	1	0	2	0	02	Penyediaan Perakitan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Perakitan dan Peralengkapan Kantor dan ATK	N/A	6 unit	6.461.700	6 unit	6.561.700	6 unit	7.150.000	6 unit	8.000.000	6 unit	9.000.000	6 unit	15.000.000	
2	1	0	2	0	03	Penyediaan Pecutan Rantai Tangga	Jumlah bulan terlengkapannya Penyediaan Pecutan Rantai Tangga	180 buah	180 buah	8.500.000	180 buah	8.600.400	180 buah	9.000.000	180 buah	9.000.000	180 buah	9.000.000	180 buah	9.000.000	
2	1	0	2	0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terlengkapannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5000 lembar	5000 lembar	8.700.000	5000 lembar	8.750.750	5000 lembar	8.900.000	5000 lembar	10.000.000	5000 lembar	12.000.000	5000 lembar	18.000.000	
2	1	0	2	0	06	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku dan Pasokan Perundang-undangan yang disediakan	N/A	1800 exemplar	4.000.000	1800 exemplar	5.000.000	1800 exemplar	7.000.000	1800 exemplar	8.000.000	1800 exemplar	11.000.000	1800 exemplar	11.800.000	
2	1	0	2	0	08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Mekanisme dan Minuman yang disediakan	1 tahun	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	8.000.000	1 tahun	8.020.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	11.800.000	
2	1	0	2	0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	N/A	1 tahun	85.125.000	1 tahun	85.130.000	1 tahun	90.500.000	1 tahun	85.000.000	1 tahun	95.000.000	1 tahun	100.000.000	
2	1	0	2	0	10	Penyediaan Anop Dinamis pada SKPD	Pembayaran Anop yang Dinamis pada SKPD	N/A	Pembelian Anop Dinamis OPD	-	Pembelian Anop Dinamis OPD	-	Pembelian Anop Dinamis OPD	1.000.000	Pembelian Anop Dinamis OPD	1.000.000	Pembelian Anop Dinamis OPD	2.000.000	Pembelian Anop Dinamis OPD	10.800.000	
2	1	0	2	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan terlengkapannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	1.680.000	12 bulan	6.320.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	8.000.000	
2	1	0	2	0	7	Pengadaan Barang HSE Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Barang Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	N/A	90%	-	92%	315.435.508	94%	379.356.762	96%	665.394.496	98%	1.408.888.068	100%	1.446.137.093	
2	1	0	2	0	01	Pengadaan Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Re/RD Rental	N/A	1 Sepeda Motor roda 2	-	1 unit B4 dan 1 unit R2 Kendaraan Dinas	180.000.000	2 unit Sepeda Motor R2	90.000.000	2 Sepeda Motor R2	80.000.000	1 unit B4 Kendaraan Dinas	400.000.000	2 Sepeda Motor R2	70.000.000	

2	1	2	2	2	32	Pengadaan Danah Operasional atau Lapangan	Jumlah Kandang Dosis R4/R2 (Rantai)	N/A	1 Sepeda Motor roda 2	-	1 unit R4 Kandang Pelayaran	180.000,00	2 unit Sepeda Motor R2	52.000,000	1 Sepeda Motor R2	32.000,000	3 unit R4 Kandang Dosis	200.000,00	2 Sepeda Motor R2	65.000,000	
2	1	2	2	0	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	N/A	2 Paket	-	2 Paket	5.000,000	2 Paket	7.500,000	2 Paket	8.250,000	2 Paket	10.000,000	2 Paket	15.000,000	
2	1	0	2	0	07	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Tanah yang Dondakan	N/A	500 Meter Persegi	2	500 Meter Persegi	80.000,000	500 Meter Persegi	71.308,762	500 Meter Persegi	220.000,00	500 Meter Persegi	300.000,00	500 Meter Persegi	500.000,00	
2	1	0	2	0	08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	N/A	1 Unit	-	1 Unit	55.000,000	1 Unit	60.000,000	1 Unit	280.000,00	1 Unit	400.000,00	1 Unit	818.137,83	
2	1	0	2	0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	1 Komputer Laptop dan 1 Printer	-	1 Komputer Laptop dan 1 Printer	15.000,000	3 Unit AC, 2 Unit TV LED 42"	42.850,000	2 Unit TV LED 64"	25.000,000	1 Unit Puncak Tawar J laptop	8.000,000	2 Komputer Laptop dan 2 Printer	30.000,000	
2	1	2	2	0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	Tiang Pakar R2	-	Ruang rapat	30.435.508	Ruang Performed PTPP dan lain-lain	44.800,000	Tiang pakar R2	67.344.400	Ruang kantor dan bidang	100.000,00	Ruang katha	150.000,00	
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeriksaan Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	141.183,880	100%	134.725,800	100%	128.385,800	100%	126.530,800	100%	204.568,800	100%	320.588,800	Selanjutnya
2	1	0	2	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	25.400,000	1 tahun	24.680,000	1 tahun	38.000,000	1 tahun	30.100,000	1 tahun	30.000,000	1 tahun	40.000,000	
2	1	0	2	0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	35.205,000	1 tahun	25.637,000	1 tahun	48.237,000	1 tahun	40.000,000	1 tahun	52.000,000	1 tahun	68.000,000	
2	1	0	2	0	03	Penyediaan Jasa Restoran dan Penghijauan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Restoran dan Penghijauan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	6.578,000	12 Bulan	6.300,000	12 Bulan	12.000,000	12 bulan	16.000,000	
2	1	0	2	0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Keseluruhan Tenaga IT, Supir, dan Kebersihan perkantoran	10 Orang	10 Orang	80.508,800	10 Orang	72.508,800	11 Orang	60.250,880	12 Orang	105.150,880	13 Orang	108.508,80	14 Orang	204.588,80	
2	1	0	2	0		Pemeriksaan Berang MBK Daerah	Pemeriksaan Terselenggaranya Pemeriksaan Berang MBK Daerah	100%	100%	26.128,000	100%	194.128,00	100%	190.794,76	100%	282.990,00	100%	483.980,00	100%	633.080,00	

2	1	0	2	0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perawatan Diesel atau Kendaraan Diesel Jabatan	Jumlah Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perawatan Diesel atau Kendaraan Diesel Jabatan	12 bulan	12 Bulan	28.200.000	12 Bulan	27.300.000	12 Bulan	30.580.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	44.000.000
2	1	0	2	0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Diesel Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Diesel Operasional atau Lapangan	N/A	12 Bulan	0	12 Bulan	10.300.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000
2	1	0	2	0	09	Perawatan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Biaya Gedung Kantor yang diperluas/Rehabilitasi	1 Gedung	12 Bulan	28.128.000	12 Bulan	17.128.000	12 Bulan	21.600.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	28.000.000	12 Bulan	30.000.000
2	1	0	2	0	10	Perawatan/Rehabilitasi Sana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Biaya Sana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang di Perluas/Rehabilitasi	N/A	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	30.000.000

Bil 7: Beangbaban sumber sumber pendanaan dan kegiatan abalab investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

UJIAN	SASARAN	Penetapan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	Penyediaan	
2	1	0	2	0	01	URUSAN PENERSTAHAN BIDANG PERANAMAN MODAL															
2	1	0	2	0	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PERANAMAN MODAL	Penyediaan Rencana Umum Perencanaan Modal Daerah	1 dokumen	1 dokumen	55.572.330	1 dokumen	55.740.887	1 dokumen	103.004.230	1 dokumen	112.831.440	1 dokumen	121.733.123	1 dokumen	122.424.795	DPHPTP
2	1	0	2	0	01	Peningkatan Fasilitas/Insentif Bidang Perencanaan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dan dokumen Terimakasihnya Rencanakan Peningkatan Fasilitas/Insentif Bidang Perencanaan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	19.810.000	12 bulan	39.940.820	12 bulan	35.000.000	12 bulan	41.834.920	12 bulan	46.446.246	12 bulan	52.353.990	
2	1	0	2	0	01	Peningkatan Kebijakan Daerah mengenai Peningkatan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Perencanaan Modal	Jumlah Peningkatan Kebijakan Daerah mengenai Peningkatan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Perencanaan Modal	1 dokumen, Perbup	2 dokumen, 3 Perbup	19.810.000	2 dokumen, 3 Perbup	39.940.000	2 dokumen, 3 Perbup	30.000.000	2 dokumen, 3 Perbup	22.000.000	2 dokumen, 3 Perbup	24.446.246	2 dokumen, 3 Perbup	25.575.214	PM

2	1	0	2	0	1	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen, 1 Perbup	2 dokumen, 2 Perbup	-	2 dokumen, 1 Perbup	11.139.824	2 dokumen, 1 Perbup	15.000.000	2 dokumen, 1 Perbup	19.504.520	2 dokumen, 2 Perbup	25.000.000	2 dokumen, 3 Perbup	26.677.700	PH
2	1	0	2	0	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dan dokumen Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	26.762.320	12 bulan	57.799.261	12 bulan	66.994.230	12 bulan	79.876.720	12 bulan	72.276.873	12 bulan	70.171.766	
2	1	0	2	0	2	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai Investasi Berbasis Nasional (PMDN/PMA)	1 dokumen	1 dokumen	30.762.320	1 dokumen	32.790.261	1 dokumen	35.094.230	1 dokumen	39.500.000	1 dokumen	36.000.000	1 dokumen	31.074.786	PH
								Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	PH	
2	1	0	2	0	2	03	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	25.900.000	12 bulan	31.000.900	12 bulan	35.376.720	12 bulan	36.276.877	12 bulan	36.467.000	PH
2	1	0	3				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Investasi Berbasis Nasional (PMDN/PMA)	1 dokumen 4 Event	1 dokumen 4 Event	31.602.823	1 dokumen 8 Event	27.726.998	1 dokumen 8 Event	127.125.474	1 dokumen 8 Event	144.293.958	1 dokumen 8 Event	157.786.233	1 dokumen 7 Event	153.838.882	DPWPTP
2	1	0	3	0	1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadik Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dokumen dan Event Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadik Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	31.602.823	12 bulan	27.726.998	12 bulan	127.125.474	12 bulan	144.293.958	12 bulan	157.786.233	12 bulan	153.838.882	
2	1	0	3	0	1	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Terdapatnya Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7.726.998	1 Dokumen	52.125.474	1 Dokumen	54.293.958	1 Dokumen	52.789.233	1 Dokumen	48.800.982	PH
2	1	0	3	0	1	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi Investasi	4 Event	4 Event	31.602.823	4 Event	20.900.000	4 Event	75.000.000	4 Event	90.000.000	4 Event	126.000.000	4 Event	108.000.000	PH
2	1	0	4				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Index kepuasan masyarakat pengguna Daerah	80	80	26.122.446	80	75.564.628	80	136.534.178	90	154.122.183	90	163.161.954	90	171.798.475	DPWPTP

2	1	0	2	0		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu melalui Penerapan Model yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu melalui Penerapan Model yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12 bulan	12 bulan	86.127.448	12 bulan	75.964.828	12 bulan	138.334.170	12 bulan	154.132.183	12 bulan	163.383.554	12 bulan	171.788.476	
2	1	0	2	0	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1500 dokumen	1500 dokumen	43.247.440	1700 dokumen	32.884.628	2000 dokumen	31.034.170	2300 dokumen	54.132.183	2300 dokumen	49.763.554	2400 dokumen	46.799.476	Perizinan
2	1	0	2	0	02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	800 juta	800 juta	15.900.000	800 juta	15.900.000	800 juta	17.900.000	800 juta	20.000.000	800 juta	23.500.000	800 juta	25.000.000	Wandel
2	1	0	2	0	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengalihan pengadilan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah bulan penyediaan layanan konsultasi dan pengalihan pengadilan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	25.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000	Perizinan
2	1	0	2	0	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Fasilitas/Instansi Daerah	Jumlah bulan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Fasilitas/Instansi Daerah	12 bulan	12 bulan	27.380.000	12 bulan	27.380.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	Perizinan
2	1	0	2	0		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Objek Perlakuan dan non perlakuan yang diawasi, dilaksanakan dan ditertibkan	100 objek	100 objek	376.439.910	110 objek	343.935.182	120 objek	386.734.583	130 objek	214.640.411	130 objek	237.812.916	130 objek	238.639.552	1.111.735.954
2	1	0	2	0		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12 bulan	12 bulan	276.439.910	110 bulan	343.935.182	120 bulan	386.734.583	120 bulan	214.640.411	120 bulan	237.812.916	120 bulan	238.639.552	
2	1	0	2	0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan PMA/PMDF yang menyampaikan Laporan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	151.706.919	15 Perusahaan	117.890.182	15 Perusahaan	45.000.000	15 Perusahaan	50.000.000	15 Perusahaan	55.000.000	15 Perusahaan	55.000.000	PM





2	1	0	2	2	0		Penyusunan, Penetapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan, Penetapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	14.940.999.381	12 bulan	13.116.496.886	12 bulan	14.732.516.438	12 bulan	14.757.336.647	12 bulan	14.585.251.721	12 bulan	14.093.865.710	Jumlah:
3	1	0	2	2	0	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda	Dokumen Ranperda	1 Dokumen Perda	100.000.000	1 Dokumen Perda	100.000.000	1 Dokumen Perda Revisi	100.000.000	-	-	1 Dokumen Perda Revisi	100.000.000	-		
3	1	0	2	2	0	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan, Penyebaran dan Penyalahgunaan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi	N/A	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
3	1	0	2	2	0	03	Koordinasi, dan Sinkronisasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah wirausaha dan tenaga kerja di bidang industri yang masih	200 Wirausaha/ Tenaga Kerja	200 Wirausaha/ Tenaga Kerja	-	240 Wirausaha/ Tenaga Kerja	-	240 Wirausaha/ Tenaga Kerja	150.000.000	240 Wirausaha/ Tenaga Kerja	150.000.000	240 Wirausaha/ Tenaga Kerja	150.000.000	240 Wirausaha/ Tenaga Kerja	150.000.000	
3	1	0	2	2	0	04	Koordinasi, dan Sinkronisasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah DOK yang disertifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
3	1	0	2	2	0	05	Koordinasi, dan Sinkronisasi, pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Fasilitasi Masyarakat	Persentase pembangunan antara DOK cobat dan Jumlah Sertu DOK yang dikembangkan	30%	1 sertu	14.847.389.281	1 sertu	13.013.896.806	2 sertu	14.133.516.428	2 sertu	14.257.336.947	2 sertu	13.892.251.721	2 sertu	13.983.865.710	
3	1	0	2	2	0	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen yang dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
3	1	0	3				<b>PROGRAM PENGENDALIAN UTM USAHA INDUSTRI</b>	Peningkatan jumlah Industri kecil dan Menengah yang bersertifikasi	sertifikat	sertifikat	-	sertifikat	-	sertifikat	162.061.377	sertifikat	163.870.407	sertifikat	161.899.432	sertifikat	156.154.062	644.115.286,00
3	1	0	3	2	0		Pemeriksaan Etna Usaha Industri (UI), dan Perluasan Usaha Industri (PUI), Etna Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Etna Perumahan Kawasan Industri (PKI) Kovenanangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAG)	Persentase Pemeriksaan Etna Usaha Industri (UI), dan Perluasan Usaha Industri (PUI), dan Etna Kawasan Industri (UKI) dan Etna Perumahan Kawasan Industri (PKI) Kovenanangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAG)	80%	80%	-	82%	-	84%	162.061.377	86%	163.870.407	88%	161.899.432	100%	156.154.062	

							01	Fasilitas Peremuan Kawasan perindustri IZ, IPUL, IJIKI dan IPK Kawasan/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Petunjuk Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah IEM yang tersertifikat di bidang industri	N/A	50 Sertifikat	-	50 Sertifikat	-	50 Sertifikat	62.960.377	50 Sertifikat	113.070.407	50 Sertifikat	91.009.422	50 Sertifikat	100.000.000
							02	Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IZ, IPUL, SIRC dan IPK Kawasan/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah dokumen hasil koordinasi	N/A	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	96.154.063
								<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Terselengkapnya data dan Informasi tentang Industri kecil dan menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	48.894.413	1 Dokumen	188.367.488	1 Dokumen	177.118.384	1 Dokumen	171.786.470
								Penyediaan Informasi Industri untuk IZ, IPUL, IJIKI dan IPK Kawasan/Kota	90%	90%	-	-	92%	-	94%	48.894.413	96%	188.367.488	98%	177.118.384	100%	171.786.470
							01	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Dokumen Data Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	53.275.447
							02	Diagnosis dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SINAS	Jumlah Dokumen Dipublikasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	8.894.413	1 Dokumen	95.734.936	1 Dokumen	86.220.728	1 Dokumen	77.896.823

																					Pembinaan dan Cetak Kabupaten Perumahan Industri dan Perumahan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyempakan Data ke SDHes	Jumlah Perusahaan yang Dibantu dan Devokasi												
		3	3	0	2	0	0									3	3				3	3	-	3		3	20.000.000	3	44.632.952	3	30.389.638	3	40.000.000	
			1	4		1										Perusahaan	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Perusahaan	20.000.000	Perusahaan	44.632.952	Perusahaan	30.389.638	Perusahaan	40.000.000						

PARIAMAN, 24 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**  
 Pembina Utama Muda, Nip. 19790402 199803 1 003

REVIU BERJEMANG					
Ketua Tim		Deputi		Wakil	
Tanggal	Paralel	Tanggal	Paralel	Tanggal	Paralel

TC. 27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di sandingkan (KEPMENDAGRI 050-4889 TAHUN 2021)  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2025

Kategori	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Output/Wujud/ outcome)	Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Kode/Bidang dan Kementerian Daerah		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan										Peringkat 1 Daerah Penanggung Jawab											
						Indikator	Sasaran		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD										
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
REVISI : Beranggotakan tim tenaga pemerintah yang efektif, berprestasi, berdedikasi, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, adaptif, partisipatif dan transparan																														
Kategori Kinerja Kategori yang masuk di bidang	SASARAN 1: Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Efisiensi Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor Pelayanan Publik	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembacaan dan Penyerapan Anggaran	100%	100%	Rp19.018.187.872	100%	Rp17.737.484.084	100%	Rp18.704.368.339	100%	Rp20.492.735.288	100%	Rp21.551.523.538	100%	Rp21.380.943.889												
						100%	100%	Rp5.486.416.289	100%	Rp4.176.812.142	100%	Rp4.178.812.142	100%	Rp4.336.248.548	100%	Rp5.345.211.819	100%	Rp4.266.916.432												
						A	A		A	A	A	A	A	A	A	A														
						100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
						2	1	0	1	2	0	1		N/A	0%	34.834.192	10%	35.660.000	94%	48.157.619	94%	52.163.000	94%	54.710.000	100%	69.586.000	Sangat Baik			
						2	1	0	1	2	0	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1,DPA Perubahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	12.250.000	5 Dokumen	12.300.000	5 Dokumen	13.780.000	5 Dokumen	13.823.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	18.000.000
						2	1	0	1	2	0	1	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilakukan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	1.746.000	2 dokumen	2.750.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	15.200.000
						2	1	0	1	2	0	1	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilakukan	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	7.283.000	2 dokumen	8.540.000	2 dokumen	9.000.000	2 dokumen	11.000.000
2	1	0	1	2	0	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LRP, Laku, Lap Capaian	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Indikator realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	-	5 dokumen	-	5 dokumen	8.029.619	5 dokumen	8.950.000	5 dokumen	9.230.000	5 dokumen	11.380.000						

2	1	0	2	0	01	Desain Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen teknisnya: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DNHTP (Lada, Lada)	Jumlah laporan output kinerja perangkat daerah	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12.994.250	3 dokumen	12.700.000	3 dokumen	13.685.000	3 dokumen	14.000.000	3 dokumen	15.480.000	3 dokumen	20.000.000
2	1	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	3.247.116.738	100%	3.257.383.738	100%	3.268.186.711	100%	3.562.381.999	100%	3.872.213.818	100%	4.888.733.138
2	1	0	2	0	01	Revisi dan Tindakan ASN	Jumlah Perbaikan (Gaji dan Tunjangan Kerja ASN)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah	3.200.435.738	1 Perangkat daerah	3.210.321.738	1 Perangkat daerah	3.215.126.173	1 Perangkat daerah	3.204.607.249	1 Perangkat daerah	3.803.246.643	1 Perangkat daerah	4.029.495.702
2	1	0	2	0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah total pelaksanaan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12 bulan	12 bulan	40.880.000	12 Bulan	40.780.000	12 Bulan	40.986.518	12 Bulan	42.254.750	12 Bulan	51.984.375	12 Bulan	60.196.617
2	1	0	2	0	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	WA	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	5.400.000	1 dokumen	7.300.000	1 dokumen	8.600.000	1 dokumen	9.500.000
2	1	0	2	0	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap. Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12 bulan	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.200.000	12 bulan	6.900.000	12 bulan	8.300.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.500.000
2	1	0	2	0		Administrasi Kapasitas Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah			98%	98%	23.053.800	92%	14.947.240	94%	36.598.930	96%	40.976.473	98%	45.900.800	100%	55.986.800
2	1	0	2	0	02	Pengadaan Pakan Dinas Berbasis Akibat Kelangkaannya	Jumlah Pakan Dinas Berbasis Akibat Kelangkaannya	Jumlah paket pakan dinas berbasis akibat kelangkaan	Paket	WA	42 orang	-	42 orang	-	42 orang	7.500.000	42 orang	8.300.000	42 orang	9.430.000	42 orang	15.000.000
2	1	0	2	0	03	Pendidikan dan Pelatihan Serdikam Tugas dan Fungsinya	Jumlah ASN DPMPPT yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Serdikam Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai serdikam tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan pelatihan	Orang	12 Orang	13 orang	-	12 orang	5.947.246	12 orang	8.750.000	12 orang	9.275.473	12 orang	10.590.000	12 orang	11.000.000
2	1	0	2	0	04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	WA	42 orang	-	42 orang	-	42 orang	5.890.000	42 orang	8.400.000	42 orang	9.000.000	42 orang	9.500.000
2	1	0	2	0	05	Sinergis Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Pencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sinergis teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	WA	6 orang	20.003.000	6 orang	8.000.000	6 orang	14.500.000	6 orang	15.200.000	6 orang	17.000.000	6 orang	20.000.000